

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdapat pada pasal 11 yang berkaitan tentang Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perubahan 2024 – 2026 Tahun 2023 dan Renja Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang dicita – citakan maka perlu dituangkan dalam suatu perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat perangkat daerah yang berupa rencana strategis perangkat daerah selama periode 5 (Lima) tahun dan rencana kerja perangkat daerah selama periode (satu) tahun Rencana kerja (Renja). Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

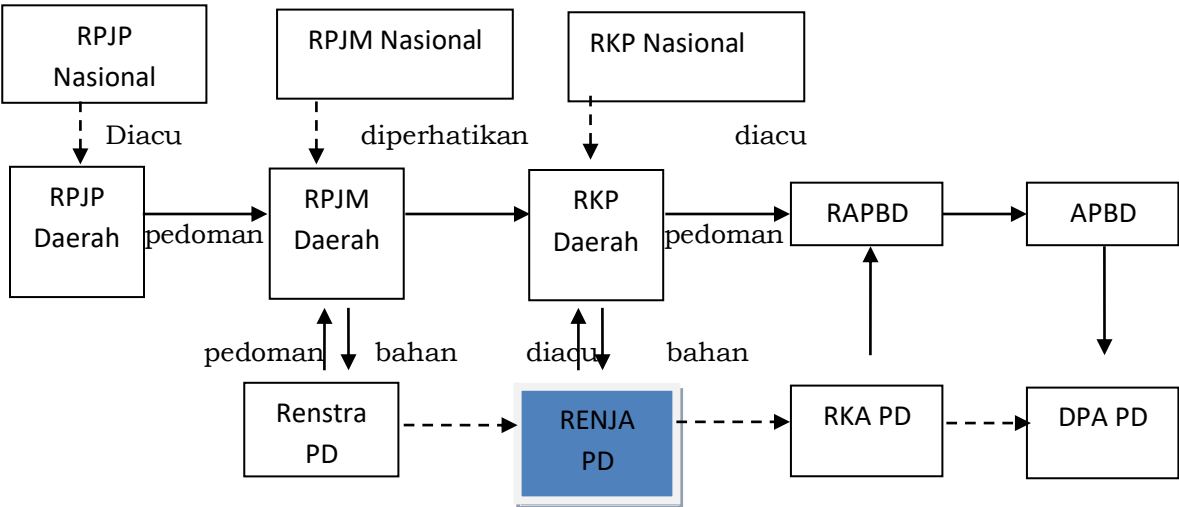
Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024 Kecamatan Pasrepan merupakan Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan Kepala Perangkat Daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan dituntut untuk lebih baik dari tahun– tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pasrepan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Kecamatan Pasrepan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasrepan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja Perubahan merupakan acuan Kecamatan Pasrepan untuk memasukan program, kegiatan, dan Subkegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;
3. Renja Perubahan Kecamatan Pasrepan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / Subkegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Pasrepan pada Tahun 2024 ini yang merupakan realisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
4. Dalam Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Pasrepan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan, sehingga bisa diperoleh rencana kerja yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penyusunan rancangan awal Renja Perubahan Kecamatan Pasrepan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Pasrepan yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Pasrepan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Pasrepan dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perkembangan gerakan koperasi dan usaha mikro

Kecamatan Pasrepan, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Pasrepan pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pasrepan yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Pasrepan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Pasrepan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen rencana kerja Perubahan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Pasrepan yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Pasrepan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang- undang Nomor 12 Tahun 2021;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  24. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12 );
  26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
  27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan tahun 2024 – 2026.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rencana kerja Perubahan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD maupun RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pasrepan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pada Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja perubahan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Kecamatan Pasrepan, proses penyusunan Renja Kecamatan Pasrepan, keterkaitan antara Renja Kecamatan Pasrepan dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Pasrepan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan

peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Pasrepan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Pasrepan, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasrepan Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Pasrepan; Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Pasrepan.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasrepan**

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Pasrepan untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah**

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

## **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pasrepan dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik,



terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Hasil Renja Perubahan 2024 Triwulan II Kecamatan Pasrepan.**

Dalam sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tahun (2023) dan perkiraan target tahun berjalan (2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tahun-tahun sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut Renja Perubahan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pasrepan melalui tabel 2.1 berikut :

## **Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sampai Tribulan II Tahun 2024.**

Anggaran belanja / pengeluaran Kecamatan Pasrepan tahun 2023 Adalah sebesar **Rp. 2.471.732.849,-** dari jumlah tersebut terrealisasikan sebesar **Rp. 2.211.832.503,-** Atau Sebesar **89.48 %**.

Anggaran Kecamatan Pasrepan terbagi menjadi 4 Program 8 kegiatan. Realisasi per kegiatan Kecamatan Pasrepan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun - tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 serta melalui tabel 2.1 antara lain :

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten  
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Paarepan Kabupaten Pasuruan  
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

IKU PD: - Sasaran : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan Target : 100 %

- Tujuan : - Nilai SAKIP, Target : 75 %

- Presentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan, Target : 100 %

No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)					
							I		II		III		IV			12			13 = 12/7 x 100%		14 = 6x12		15 = 14/5 x 100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Urusan Kewilayahan			tidak diisi	tidak diisi		per april 2024																
		Bidang Urusan Kecamatan				DPA MURNI																		
		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	(Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan)	100	9,162,536,865	100	2,248,737,156	20	466,805,595	7.65	184,101,006	0	-	0	-	8	650,906,601	8	29	8	650,906,601	0	7.10	
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100	99,300,000	100	3,000,000	-			0				-	-	-	-	-	-	0			
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	33,100,000	0	-	0	-		0				0%	-	-	-	-	-	0			
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	33,100,000	1	3,000,000				0				-	-	-	-	-	-	0			
		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	33,100,000		-	-	-		0				-	-	-	-	-	-	0			
		2 (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	(Persentase pemenuhan administrasi keuangan)	100	7,629,797,872	100	2,042,307,556	22	448,471,076	41.1	184,101,006	0	-	0	-	41	632,572,082	41	31	41	632,572,082		8.29	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN)	168	6,362,721,412	12	1,657,927,000	12	353,229,368	12	154,987,388	0	-	0	-	100	508,216,756	833	31	100	508,216,756		7.99	
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	36	1,152,682,860	12	349,820,556	3	89,481,708	1	29,113,618	0			8	118,595,326	69	34	8	118,595,326		10.29		
		3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelakupengadaan barang/jasa)	36	114,393,600	12	34,560,000	3	5,760,000	1	-	0			8	5,760,000	69	17	8	5,760,000		5.04		
		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD	100	16,550,000	100	1,000,000	-	-		0				-	-	-	-	-	-	0			
		1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	16,550,000	1	1,000,000	0	-		0				-	-	-	-	-	-	0			
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	66,200,000		2,727,600	-	-		0				-	-	-	-	-	-	0			
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	16,550,000	1	2,727,600	0	-		0				-	-	-	-	-	-	0			
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12	49,650,000	0	-	0	-		0				-	-	-	-	-	-	0			
		5 (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	98,866,390		50,392,000		9,270,200		-	0			-	9,270,200	-	18	-	9,270,200		9.38		
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	16,116,390	7	5,000,000	0	-		0				-	-	-	-	-	-	0			
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22	82,750,000	22	10,392,000	0	-		0				-	-	-	-	-	-	0			

		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	3,310,000		0	-	0	-		0		-	-	#DIV/0!	-	-	-	0	
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	8	24,806,464		8	5,000,000	0	-		0		-	-	-	-	-	-	0	
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	11,916,000		0	-	0	-		0		-	-	#DIV/0!	-	-	-	0	
		6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	100	8,394,160		0	-	0	-		0		-	-	#DIV/0!	-	-	-	0	
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	36	304,056,600		12	30,000,000	6	9,270,200		0		-	9,270,200	-	31	-	9,270,200	3.05	
		8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	33,100,000		0	-	0	-		0		-	-	#DIV/0!	-	-	-	0	
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	413,750,000		1	42,580,000				0		-	-	-	-	-	-	0	
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	148,950,000		0	-				0		-		#DIV/0!	-	-	-	0	
		2	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	66,200,000		0	-				0		-		#DIV/0!	-	-	-	0	
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	198,600,000		1	42,580,000				0		-		-	-	-	-	0	
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (PenunjangNital	100	248,103,830		100	30,000,000		5,764,319		-	0		-	5,764,319	-	19	-	5,764,319	2.32
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	96	248,103,830		48	30,000,000	12	5,764,319		-	0		-	5,764,319	-	19	-	5,764,319	2.32
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	589,968,773		100	76,730,000	4.30	3,300,000		-	0		-	3,300,000	-	4	-	3,300,000	0.56
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5	350,966,251		5	65,730,000	3.00	3,300,000			0		-	3,300,000	-	5	-	3,300,000	0.94
		2	Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	33,100,000		0	-	0	-			0		-	#DIV/0!	-	-	-	-	0
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	33,100,000		15	6,000,000	0	-			0		-	-	-	-	-	-	0
		4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantor	1	149,500,784		0	-	0	-			0		-	#DIV/0!	-	-	-	-	0
		5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala Peralat/gedung/ kantor	10	23,301,738		10	5,000,000	0	-			0		-	-	-	-	-	-	0
	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	185,022,380		100	28,101,300	99	12,054,800		-	0		-	12,054,800	99	43	99	12,054,800	6.51532





Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pasrepan tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum adanya landasan Hukum yang jelas untuk penyerapan anggaran Sarana Prasarana yang ada dikelurahan melalui Pihak Kelompok Masyarakat;
- c. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan;
- f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasrepan dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan



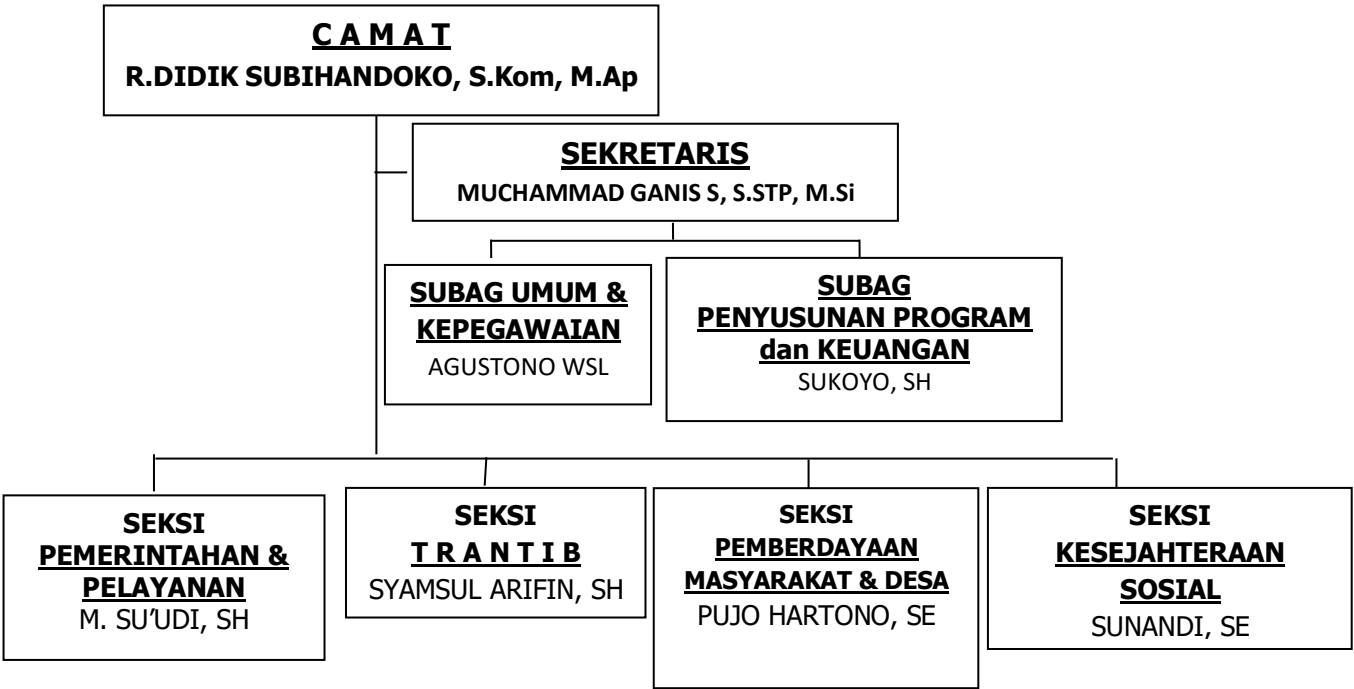
- kapabilitas, kompetensi (reward and punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
- b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi;
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Pasrepan dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah;
  3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
    - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;.
    - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Pasrepan

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASREPAN

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007)



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan dating adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dpaat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Kecamatan Pasrepan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pasrepan akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategisnya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pasrepan dapat dilihat dari indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pasrepan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

#### 1. Lingkungan Internal

##### **Kekuatan :**

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

##### **Kelemahan**

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

#### 2. Lingkungan Eksternal

##### **Peluang**

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 Tahap kedua (2019 – 2023)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

**Ancaman :**

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-Tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasrepan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan

non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;

- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur .

## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Pasrepan sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.4 berikut :

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Renja Kecamatan Pasrepan saat ini masih belum mengakomodir usulan usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan Kecamatan Pasrepan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Pasrepan dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pasrepan telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik
- Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
- Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.
- Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
- Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi

**3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PASREPAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategis ini, maka Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan adalah :

TUJUAN / SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	FORMULA / PENJELASAN
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan	Hasil Perhitungan IKM berdasarkan Aplikasi e-tamu
Sasaran 1 : Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	(Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program) x 100
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat

Sedangkan Sasaran strategis Kecamatan Pasrepan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategis Kecamatan Pasrepan adalah Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator

kinerjanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) Kecamatan

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan pemetaan program dan Kegiatan menurut kodefikasi dan nomenklatur sesuai Permendagri 90 tahun 2019. (Tabel pemetaan dan Lampiran KUA PPAS 2021 sebagaimana terlampir).

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN PASREPAN**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Program Merupakan Kumpulan Kegiatan Yang Menggambarkan Tindakan-Tindakan Yang Akan Dilakukan Untuk Menjalankan Misi Yang Diemban Oleh Suatu Organisasi. Adapun Kegiatan Merupakan Suatu Tindakan Dari Penjabaran Program Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Sesuai Dengan Kebijakan Yang Telah Digariskan. Berpedoman Pada Tahun Sebelumnya Maka Program-Program Serta Kegiatan-Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2024 Adalah Sebagai Berikut :

##### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah terdiri dari :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari :
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari :
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya ;
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
  - Fasilitas Kunjungan Tamu ;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
  - Pengadaan Meubelair ;
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari :
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Pemeliharaan Meubelair ;

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;

## **II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

### **1. Koordinansi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri dari :**

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

### **2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan :**

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

### **3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

- Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

## **III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

### **1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari :**

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

## **IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### **1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdri dari :**

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ;
- Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

### **2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada terdiri dari :**

- Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

## **VI. Program Pembinaan Dan Pengawasan Peemrintahan Desa**

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa.

Adapun Implementasi Rencana Progam / Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Sebagaimana Pada Table 3.1 (Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan OPD / Kecamatan Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat di table 3.1

#### BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan (Perubahan Renja Kecamatan Pasrepan) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pasrepan yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang, sehingga menjadi satu kesatuan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- e. Seluruh pejabat dan staf Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan secara bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - Melaksanakan Perubahan Renja 2024 dengan sebaik baiknya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
  - Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- f. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Pj. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO